

# **Permasalahan yang Timbul dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi**

**Nur Hidayah**

UNU YOGYAKARTA  
hidayahaq@unu-jogja.ac.id

## **Abstrak**

Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi sangat erat, bagaikan saudara kandung yang dipertemukan oleh keberadaan Arab Saudi sebagai *Khodimul Haramain* dan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kedua negara ini saling menjaga hubungan yang terjalin antara keduanya. Hubungan ini bersifat penting dan tak bisa digantikan keberadaannya oleh negara lain. Akan tetapi, jalinan hubungan ini kemudian menimbulkan permasalahan yang tak bisa dianggap sepele, seperti berkembangnya sebuah paham yang menjadi dasar negara Arab Saudi, namun bertentangan dengan praktek-praktek keagamaan muslim Indonesia, jumlah jama'ah haji dan umrah Indonesia yang sangat besar, serta permasalahan seputar pekerja migran Indonesia, seperti banyaknya jumlah pekerja migran ilegal atau hukuman mati bagi pekerja migran Indonesia tanpa prosedur yang jelas. Indonesia dan Arab Saudi terus berupaya mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Di sisi lain, ketiga hal tersebut memiliki peranan penting bagi masing-masing negara, dan memberikan keuntungan devisa bagi Indonesia dan atau Arab Saudi. Penelitian kualitatif

deskriptif ini disusun untuk memaparkan permasalahan yang timbul dari hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi, dan upaya kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

**Kata Kunci:** Hubungan Bilateral, Arab Saudi, Indonesia, Haji dan Umrah, tenaga kerja Indonesia, Islam.

## A. Pendahuluan

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sangat lama. Catatan resmi hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi dimulai pada tanggal 1 Mei 1950 (Rachmadi, 2014:2373). Sebagai negara yang menyandang gelar *Khodimul Haramain*, Arab Saudi menjadi tujuan utama ibadah haji dan umrah muslim Indonesia setiap tahunnya. Sehingga pemerintah Indonesia memiliki kepentingan besar kepada Arab Saudi. Terlebih jumlah jamaah Indonesia setiap tahunnya adalah jama'ah terbesar jika dibanding dengan negara-negara lain. Akan tetapi Indonesia pun memiliki kedudukan yang penting bagi Arab Saudi, dengan kontribusi yang diberikan Indonesia untuk menyelesaikan salah satu permasalahan dalam negeri Arab Saudi, yaitu kelangkaan jumlah tenaga kerja. Indonesia menjadi pemasok tenaga kerja bagi Arab Saudi, terutama di sektor-sektor domestik sejak tahun 1970. Kontribusi Indonesia ini sangat berarti dan tak bisa dipandang remeh bagi Arab Saudi, meskipun kemudian tak hanya Indonesia yang mengirimkan tenaga kerjanya ke negara tersebut. Ini terlihat dari kebijakan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pemerintah Indonesia setelah hukuman pemancung kepada Ruyati binti Satubi, Pekerja migran Indonesia pada tahun 2011. Moratorium yang baru berjalan selama 3 tahun dihentikan pada tahun 2014 dengan ditandatangani MoU perlindungan dan penempatan PMI yang terkesan sangat tergesa-gesa (Fatmawati, 2016:200-201).

Di sisi lain, kebijakan luar negeri Arab Saudi yang menjadikan Islam sebagai panduan legitimasi dan aktifitas berbangsa dan

bernegara telah menyuburkan sebuah paham yang bertentangan dengan praktek-praktek keagamaan muslim yang tersebar secara luas di Indonesia. Paham ini masuk dan tumbuh subur di Indonesia karena kontribusi Arab Saudi dalam dakwah Islam di Indonesia. Arab Saudi memberikan dukungan besar bagi dakwah Islam Indonesia, baik secara finansial maupun dukungan-dukungan lainnya. Dukungan ini disalurkan melalui lembaga-lembaga dakwah atau perorangan, terutama dengan berdirinya lembaga pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta pada tahun 1980, serta semakin meluasnya kesempatan anak-anak muda Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka Arab Saudi dengan biaya penuh dari negara tersebut.

Peneliti melihat bahwa permasalahan yang timbul dari hubungan bilateral kedua negara terutama dalam ketiga aspek tersebut merupakan permasalahan utama yang muncul dari hubungan baik yang terjalin antara kedua negara. Niat baik kedua negara untuk saling membantu memenuhi kebutuhan negara lain telah menghasilkan permasalahan yang tidak sederhana bagi kedua negara. Dari sini peneliti bermaksud merumuskan permasalahan apa saja muncul dari hubungan Arab Saudi dan Indonesia serta solusi apa yang ditempuh masing-masing negara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa peranan Indonesia bagi Arab Saudi dan peranan Arab Saudi bagi Indonesia, serta manfaat apa yang didapatkan oleh masing-masing negara dari hubungan bilateral kedua negara ini.

Penelitian-penelitian tentang hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti lain, seperti Isdah dalam “hubungan Bilateral Arab Saudi-Indonesia di Era Pemerintahan Raja Salman-Joko Widodo” pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mencari dasar bagi terselenggaranya hubungan bilateral antara kedua negara dan bentuk hubungan padaera Raja Salman dan Presiden Joko Widodo saja, atau penelitian Ulfah dalam “peranan kementerian luar negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa tenaga kerja Indonesia

di Arab Saudi". Namun masing-masing penelitian masih terbatas pada satu objek permasalahan saja, sehingga peneliti merasa membutuhkan penelitian lanjutan untuk menjawab pertanyaan di atas.

## **B. Pembahasan**

Indonesia dan Arab Saudi adalah dua negara yang memiliki hubungan bilateral yang sangat kuat. Hubungan antara keduanya telah berlangsung lama. Hubungan ini terjalin karena masing-masing negara saling memiliki kepentingan yang sangat besar kepada yang lain. Sehingga masing-masing negara saling menjaga hubungan baik di antara keduanya yang terlihat dari penggantian Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al-Shuaibi, ketika mendapatkan kritikan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dinilai ikut campur dalam kebijakan dalam negeri Indonesia pada tahun 2018 silam ([www.detik.com](http://www.detik.com)).

Keberadaan Arab Saudi sebagai negara tujuan ibadah umat Islam untuk menyempurnakan rukun Islam menjadikan kedudukan negara ini tak tergantikan oleh negara manapun. Setiap tahun antusiasme Muslim Indonesia untuk melaksanakan Ibadah haji dan umroh terus mengalami peningkatan, yang bisa dilihat dengan semakin menjamurnya biro-biro travel yang menyelenggarakan perjalanan Ibadah haji dan umroh yang semakin tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Gelombang keberangkatan jama'ah haji dan umroh Indonesia yang sangat besar ini tentu saja memberikan kontribusi berarti bagi devisa Arab Saudi.

Meski catatan resmi hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi dimulai sejak tahun 1950, namun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan haji seperti jumlah kuota haji pertahunnya baru dirumuskan bersama-sama dengan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam konferensi OKI tahun 1986 di Yordania. Seluruh negara anggota OKI mendapatkan kuota 1:1000 dari jumlah penduduk muslim negara tersebut. Indonesia mendapatkan jumlah kuota yang besar, karena jumlah penduduk

muslimnya sangat besar. Jatah kuota yang didapatkan Indonesia tersebut kemudian dibagi perpropinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan dihitung secara proporsional, yaitu dengan memperhatikan jumlah pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada setiap propinsi (pasal 10 ayat 2 peraturan pemerintah no 79 tahun 2012) (Rachmadi, 2014:2373).

Jumlah jamaah haji Indonesia adalah jamaah terbesar di dunia. Hal ini karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia (Rachmadi, 2014:2374). Pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan jatah kuota sebanyak 221 ribu (detiknews.com). Kunjungan Presiden Joko Widodo untuk beribadah umroh yang dilakukan menjelang Pemilu Indonesia 2019 menghasilkan tambahan kuota sebanyak 10.000 yang akan diprioritaskan untuk para jamaah yang berusia lanjut. (www.kompas.com). Sehingga total jama'ah haji asal Indonesia pada tahun 2019 ini mencapai 231.000 jamaah.

Di samping haji, setiap tahun jamaah Umroh Indonesia pun selalu mengalami peningkatan signifikan, termasuk jumlah travel yang melayani perjalanan ibadah umroh. Jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2018 saja sejumlah 1,1 juta orang, yang diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 ini. Menurut Nur Ayla, peningkatan jumlah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti semakin membaiknya taraf hidup masyarakat muslim Indonesia dan antrean haji yang semakin panjang (www.republika.co.id).

Dapat dikatakan peningkatan jumlah jama'ah haji dan umroh ini merupakan indikator akan meningkatnya semangat keIslaman muslim Indonesia. Gerakan islamisasi ini menguat karena peranan *dakwah Islamiyyah* yang masuk ke berbagai lapisan masyarakat hingga menunjukkan hasilnya. Bukan hanya masyarakat kebanyakan saja, akan tetapi dakwah Islam ini juga masuk ke lapisan masyarakat kelas menengah dan atas. Sehingga Islam dikenal dan menjadi populer di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, sebagai *khodimul Haromain* Arab Saudi menjadikan urusan-urusan Islam sebagai salah satu aspek paling penting dalam

kebijakan luar negeri mereka (Aswar, 2016:16). Di Indonesia, Arab Saudi memberikan perhatian besar kepada dakwah Islam dan pendidikan, baik pendidikan agama Islam maupun Bahasa Arab, dengan membangun lembaga pendidikan LIPIA pada tahun 1980 yang diburu para calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia setiap tahunnya. Meski sebenarnya LIPIA menetapkan standar penerimaan yang sangat tinggi. Dari 1000-2000 pendaftar LIPIA hanya akan menerima 200 calon mahasiswa setelah meluluskan 200 mahasiswa. Hal ini terjadi karena untuk belajar di LIPIA mahasiswa tidak perlu membayar uang sepeserpun, namun mereka justru mendapatkan uang saku setiap bulan. Tentu saja ini menjadi magnet yang sangat kuat bagi anak-anak muda yang ingin belajar bahasa Arab dan agama Islam dari orang Arab, karena 90 persen dosen LIPIA adalah berkebangsaan Arab Saudi, Mesir, Sudan atau Palestina. Hanya kurang lebih 10 persen saja dosen-dosen LIPIA berkebangsaan Indonesia. Adapun dalam bidang dakwah, Arab Saudi memberikan pendanaan dan dukungan, baik moral maupun spiritual kepada organisasi keislaman milik pemerintah maupun nonpemerintah, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII); *Jamiat Islam wal-Irsyad*, atau Al-Irsyad, dan Persatuan Islam (Persis) (Fealey dan Bubalo, 2005:94-97).

Islam bukan hanya prioritas kebijakan luar negeri Arab Saudi saja, akan tetapi juga menjadi panduan legitimasi dari setiap aktifitas berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh Arab Saudi di seluruh penjuru dunia. Hal ini karena konstitusi negara Arab Saudi adalah Islam, dengan bendera bertuliskan lafadz *tauhid* dan pedang sebagai simbol *jihad*. *Tauhid* bermakna bahwa Saudi menjadikan Islam sebagai nafas hidupnya, dan *jihad* sebagai simbol perjuangan untuk memperjuangkan atau membela agama Islam (Aswar, 2016:18).

## **1. Hubungan Bilateral Indonesia Arab Saudi**

Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan bilateral dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi, sosial budaya dan ketenagakerjaan (Isdah, 2018:3). Pada tahun 2017 Raja Arab Saudi melakukan kunjungan selama sembilan hari ke

Indonesia dan menandatangani 11 poin kerjasama yang meliputi peningkatan pimpinan sidang komisi bersama, pendanaan proyek pembangunan, kerja sama di bidang usaha kecil menengah, bidang kebudayaan, kesehatan, perhubungan, keagamaan, riset dan teknologi, kelautan dan perikanan, perdagangan dan penanganan kejahatan (Isdah, 2018:5). Kunjungan selama 9 hari ke Indonesia dalam rombongan besar ini menunjukkan posisi strategis Indonesia di mata Arab Saudi. Indonesia menempati posisi yang khusus bagi Arab Saudi karena berbagai alasan, baik ekonomi maupun politik atau hal-hal strategis lainnya terutama karena Indonesia membantu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan Arab Saudi dan menjadi negara pengirim jamaah haji dan umrah terbanyak di dunia (Isdah, 2018:6).

Hubungan bilateral adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-negara di dunia, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan dan ekonomi dalam bingkai politik luar negeri masing-masing (Isdah, 2018:1). Atau keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara (Krisna, 1993:18). Hubungan bilateral dilakukan sebuah negara dengan negara lain karena adanya kepentingan dalam negeri yang hanya bisa dipenuhi dengan bekerjasama dengan negara yang bersangkutan. Sifat hubungan ini saling menguntungkan. Sebuah negara bebas untuk melakukan jalinan kerjasama bilateral dengan negara manapun yang diinginkan untuk diajak bekerjasama. Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara di dunia dengan berbagai tujuan seperti memasarkan produk, mendapatkan bahan pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh dalam negeri, atau menjalin persahabatan dengan negara tersebut, karena sifat hubungan internasional Indonesia adalah bebas aktif. Untuk mendukung hubungan ini, Indonesia membuka kantor kedutaan besar Jeddah pada tahun 1964 dan kemudian pindah ke Riyadh pada tahun 1985 (Isdah, 2018:2).

## 2. Keterlibatan Arab Saudi dalam dakwah Islam di Indonesia

Islam adalah unsur penting dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi. Negara ini menjadikan agama Islam sebagai dasar konstitusi yang langsung bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Keduanya menjadi dasar hukum bagi seluruh aspek kehidupan yang dijalankan dan diterapkan di dalam negeri. Arab Saudi tidak hanya ingin menjadikan Islam sebagai dasar agama negaranya saja, bahkan Islam menjadi panduan legitimasi dari setiap aktifitas berbangsa dan bernegara (Aswar, 2016:18). Sehingga tidak mengherankan apabila negara ini memberikan perhatian besar kepada *dakwah Islamiyah*. Setiap tahunnya kerajaan Arab Saudi menggelontorkan milyaran dolar untuk menyebarkan ajaran Islam yang dikenal di negara ini ke seluruh dunia melalui lembaga-lembaga donatur milik Saudi. Wilayah yang menjadi prioritas penyebaran Islam oleh Saudi adlah Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia (Curtin Winsor dalam Aswar, 2016:16).

Sehingga dapat dipahami bagaimana besarnya perhatian besar Arab Saudi kepada dakwah Islam di Indonesia. Indonesia menjadi negara strategis bagi Arab Saudi, sehingga memberikan perhatian besar bagi dakwah Islam, memberikan akses pendidikan tinggi agama Islam dan bahasa Arab, baik di dalam maupun di Arab Saudi secara langsung. Di samping itu juga memberikan dukungan material maupun imaterial bagi dakwah Islam Indonesia, baik yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok.

Setiap tahunnya Arab Saudi akan membuka pendaftaran dan menyeleksi dengan ketat ratusan pendaftar anak muda muslim Indonesia yang ingin belajar di universitas-universitas terkemuka di Arab Saudi, seperti Universitas Islam Madinah atau Universitas UmmAl-Qura, dan hanya menerima mahasiswa yang terbaik saja. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Arab Saudi pada tahun 2016 mencapai 900 mahasiswa yang tersebar di 10 Universitas di Saudi ([www.hajjumrahnews.com](http://www.hajjumrahnews.com)). Arab Saudi berharap para mahasiswaini akan menjadi agen dakwah Islam di Indonesia nantinya.

Di samping memberikan memberikan beasiswa pendidikan di Saudi, Pemerintah Saudi juga mendirikan Lembaga pendidikan Islam LIPIA pada tahun 1980. Lembaga ini mendapatkan dukungan penuh, baik pendanaan maupun pengadaan dosen dan yang lainnya. Perkuliahan menggunakan bahasa Arab dengan dosen yang 90 persen orang Arab menjadi magnet tersendiri bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari Islam dan Bahasa Arab dari *native speaker* Arab namun memiliki kendala untuk berangkat ke Timur Tengah. Lembaga inipun dikelola secara langsung oleh Arab Saudi. Kurikulum LIPIA adalah kombinasi kurikulum salafi dan orientasi staf pengajarnya, yang kemudian mendapatkan pengaruh *Ikhwanul Muslimin* dari para pengajar yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin, yang sering kali berseberangan dengan kultur lokal dan paraktek-praktek keagamaan Muslim Indonesia. Menurut Fealey dan Bubalo, pertemuan antara ide salafi dan ide ikhwanul muslimin ini menghasilkan alumni yang menggabungkan pandangan keagamaan puritanis dengan bentuk aktifitas politik yang lebih terbuka (2005:94-97).

Dalam bidang dakwah, Saudi memberikan dukungan kepada tiga organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). DDII didirikan pada tahun 1967. Al-Irsyad didirikan pada tahun 1913 dan bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Adapun Persis didirikan pada tahun 1924 sebagai Organisasi Muslim Modernis. Dari ketiga organisasi ini, DDII memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur jalur masuknya pendanaan Arab Saudi ke Indonesia yang telah mengalir sejak tahun 1970an. DDII juga yang membantu Pemerintah Saudi untuk mendapatkan izin pendirian lembaga pendidikan LIPIA pada tahun 1980 (Fealey dan Bubalo, 2005:97-98). Namun bukan hanya ketiga lembaga besar tersebut saja yang mendapatkan dukungan finansial dari Pemerintah Arab Saudi. Banyak lembaga-lembaga kecil atau perorangan yang mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah atau lembaga swasta Arab Saudi, baik untuk dakwah, masjid maupun yayasan sosial seperti panti asuhan.

Dukungan Arab Saudi dalam dakwah Islamiyah di Indonesiaini dalam perjalanannya kemudian melahirkan masalah ideologi yang bertentangan dengan praktek-praktek lokal muslim Indonesiadengan kemunculan gerakan baru yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Gerakan ini tumbuh subur dengan tujuan untuk memurnikan Islam dan mengembalikan ajaran-ajaran Islam hanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah saja. Gerakan ini kemudian menamakan dirinya sebagai salafi, yaitu mereka yang mengikuti para sahabat yang hidup pada abad I Hijriah dan menolak semua pembaharuan dalam agama. Menurut Iqbal, dari sudut pandang sejarah penggunaan istilah salafisme tidak merujuk pada gerakan atau kelompok Islam tertentu. Akan tetapi merupakan istilah yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir masyarakat abad pertama hijriah, yang kemudian berkembang menjadi gerakan keagamaan transnasional dengan tujuan untuk menyatukan seluruh komunitas muslim di seluruh dunia di bawah ideologinya (2013:79).

Menurut Badan Intelejen Nasional (BIN), di Indonesia gerakan *salafi* terbagi menjadi dua, yaitu *salafi jihadi* dan *salafi dakwah*. *Salafi jihadi* merupakan kolaborasi antara paham wahabi dan *Ikhwanul Muslimin* yang lebih memilih untuk menggunakan kekerasan dalam menyebarkan ideologinya. Adapun *salafi dakwah* adalah *salafi sururi*, yaitu gerakan wahabi internasional yang menyebarkan paham-paham ideologi tekstualnya dengan tujuan untuk memurnikan akidah, bersifat apolitik dan tidak disertai kekerasan fisik (Ubaidillah, 2012:43). Akan tetapi banyak kalangan yang menganggap paham ini menjadi sumber ideologi kekerasan yang dibawa oleh kelompok-kelompok ekstrimis atau radikal. Karakter eksklusif, kaku dan militan yang dimiliki paham ini dianggap dapat menginspirasi siapapun untuk melakukan tindakan kekerasan dan melawan siapapun yang dianggap sebagai musuh, baik sesama muslim maupun non muslim (Aswar, 2016:15).

### **3. Ibadah Haji dan Umroh**

Ibadah haji adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki makna multi aspek, yakni ritual, individual dan politik psikologis dan

sosial. Ritual karena haji merupakan salah satu rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang memiliki kemampuan (*istitho'ah*) untuk melaksanakannya. Individual karena merupakan ritual agama yang menjadi hal pribadi bagi masing-masing muslim. Namun pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara ibadah ini bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan dan regulasi yang tepat (Anisyah, 2013:1).

Al-Halimi dalam Nuri mengatakan haji mengumpulkan makna semua ibadah. Maka barang siapa yang melaksanakan haji, seolah-olah ia telah melaksanakan puasa, shalat, *i'tikaf*, zakat dan perang *fi sabilillah* (2014:145). Besarnya nilai ibadah haji membuat muslim Indonesia semakin bersemangat untuk dapat melaksanakan ibadah ini meski hanya satu kali seumur hidup. Ditambah dengan adanya perkembangan pemaknaan haji yang tidak hanya bernilai ibadah saja, namun berkembang ke dalam aspek lain seperti bisnis, sosial, budaya dan politik (Nuri, 2014:153).

Jama'ah haji Indonesia adalah jama'ah terbesar di dunia. Selain karena besarnya jumlah muslim Indonesia, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesadaran keberislaman Muslim Indonesia yang semakin membaik akan ibadah haji. Mereka menyadari bahwa haji adalah ibadah wajib, di samping adanya peningkatan taraf hidup muslim Indonesia. Meski setiap tahun jumlah jama'ah haji Indonesia adalah jama'ah terbesar di dunia, namun nyatanya masih meninggalkan daftar antrean yang sangat panjang di Indonesia. Pada tahun 2019 ini daftar tunggu paling lama adalah 39 tahun untuk daerah Sulawesi Selatan, sementara yang paling pendek adalah 11 tahun untuk daerah Gorontalo, Sulawesi Utara dan Maluku ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)).

Permasalahan panjangnya antrean ini berawal dengan adanya terobosan produk perbankan dana talangan haji. Seorang muslim yang belum memiliki kemampuan keuangan secara memadai dapat mendaftarkan diri untuk berhaji dengan menggunakan fasilitas dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank dengan berlandaskan pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri

Agama No. 30 tahun 2013 (Edwinar, 2015:3). Di satu sisi dapat dikatakan dana talangan ini adalah solusi bagi muslim Indonesia yang belum memiliki biaya Haji yang cukup. Namun, karena jumlah lembaga yang menawarkan produk tersebut sangat banyak, sehingga kemudian menimbulkan masalah banyaknya pendaftar Haji dan terbatasnya kuota yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga muncullah daftar antrean tunggu haji yang semakin lama semakin memanjang. Permasalahan inipun kemudian menimbulkan masalah baru, yaitu terhalangnya muslim lain yang sudah memenuhi syarat dan kewajiban untuk melaksanakan haji namun belum bisa berangkat karena harus menunggu lebih lama lagi.

Kementrian Agama dan DPR RI menetapkan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2019 sebesar 35.2 juta rupiah atau US\$ 2.481. Ongkos ini tidak mengalami perubahan dari ongkos haji tahun 2018 ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Dana ini nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji yang terdiri atas 3 dimensi penting yang mencakup sebelum keberangkatan jama'ah dan selama jama'ah melaksanakan ibadah haji hingga kembali pulang ke tanah air, yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang direpresentasikan ke dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (Edwinar, 2015:6). Seperti biaya penerbangan, living cost, pelayanan serta biaya pelayanan haji lainnya.

Biaya tersebut pada tahun 2018 digunakan untuk : (a) penerbangan sebesar 27.495.842; (b) biaya pemondokan di Mekah sebesar 4.450 Riyal Saudi dan 1200 Riyal Saudi digunakan untuk sewa pemondokan di Madinah; dan (b) *living cost* sebesar 1500 Riyal Saudi atau setara dengan 5.355.000 ([www.acehtribunnews.com](http://www.acehtribunnews.com)).

Kerajaan Arab Saudi sendiri terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pelayanan jamaah haji, seperti sistem penyewaan penginapan, transportasi, catering yang langsung dikelola oleh muassasah dengan kontrol penuh dari kerajaan Arab Saudi. Pembangunan sarana dan prasarana, berbagai sistem

yang dibuat untuk memudahkan penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan petugas haji dilaksanakan secara berkelanjutan. Sementara pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan berbagai Undang-undang seperti UU RI nomor 17 tahun 199 tentang penyelenggaraan ibadah haji, keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah, keputusan Dirjen bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kesemua undang-undang ini dibuat untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Arab Saudi sebagai *Khadimul Haramain* untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji yang aman, tertib dan tertib (Nuri, 2014:152-153).

Di sisi lain, keterbatasan keberangkatan Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci ini kemudian memberikan dampak ekonomi lain, baik di Indonesia maupundi Arab Saudi, yaitu dengan menjamurnya biro-biro travel yang menyelenggarakan ibadah umrah. Muslim Indonesia yang terhalang untuk berangkat haji pada tahun tersebut kemudian melirik ibadah umroh yang dapat dilakukan kapanpun, tanpa antrean dan dilakukan dengan biaya yang bervariasi serta jauh lebih ringan. Jika untuk berangkat haji, muslim Indonesia harus menyiapkan 35.2 juta, maka muslim Indonesia dapat melaksanakan umroh dengan mengeluarkan biaya mulai dari 20 juta saja. Fenomena ini tentu saja sangat menggembirakan jika dilihat dari kaca mata bisnis. Euforia muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh kemudian disambut gembira oleh biro-biro travel dengan menyelenggarakan paket perjalanan ibadah Umroh. Menurut Masitah, bisnis travel haji dan Umroh adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Karena besarnya permintaan dan kemungkinan sebuah biro untuk mendapatkan keuntungan bersih US\$300 dengan margin profit hanya sebesar 3-5% dari setiap jama'ah dengan jumlah jama'ah 3500 (2015:243).

Permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi juga terjadi di Arab

Saudi, terutama pada penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurut Sodik Mujahid, ada lima masalah yang selalu berulang pada pelaksanaan haji setiap tahunnya dan membutuhkan perhatian serius. (1) kapasitas tenda di Mina yang masih minim dan kurang memadai; (2) keberadaan toilet di maktab Mina; (3) keberadaan bus *shalawat* yang jumlahnya tak sebanding dengan jumlah *jama'ah*; (4) catering (5) penempatan *jama'ah* Indonesia di Mina jadid yang jauh dari *jamarot* ([www.indopos.co.id](http://www.indopos.co.id)).

#### **4. Pekerja Migran Indonesia**

Selain menjadi tujuan ibadah, Arab Saudi juga menjadi tujuan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja. Sedikitnya lapangan pekerjaan dan perekonomian di pedesaan yang tidak tumbuh membuat sebagian tenaga kerja Indonesia kelas menengah ke bawah melirik pilihan untuk bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lebih memilih untuk bekerja di luar negeri. Para tenaga kerja ini banyak yang memilih Arab Saudi dibanding negara-negara lain yang lebih aman dan menjanjikan bagi penghasilan mereka. Mereka memilih Arab Saudi dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji yang sangat sulit untuk mereka wujudkan, jika mereka hanya bekerja di Indonesia. Jumlah PMI yang memilih Arab Saudi sebagai negara tujuan bekerja sangat besar, namun 90 persen dari mereka bekerja di sektor domestik dan berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (Putri dan Nismi, 2014:2).

Arab Saudi adalah negara dengan jumlah imigran terbesar karena hampir melebihi jumlah penduduk asli yang ada di Arab Saudi. Jumlah tenaga kerja asing mencapai 8-9 juta orang dari 27 juta populasi yang ada, dengan 905 orang sebagai pembantu rumah tangga atau bekerja dalam wilayah domestik. Sebagai negara pengekspor minyak, Arab Saudi menjadi negara pilihan yang cukup menjanjikan, meskipun politik ekonomi mereka kini tak lagi mengandalkan kepada minyak bumi. PMI yang bekerja di Arab Saudi tersebar dalam beberapa sektor pekerjaan, yaitu pembantu rumah

tangga, pengemudi bus dan pengepakan barang yang ditempatkan di sektor formal dan informal (Putri dan Nismi, 2014:2-4).

Tahun 2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat remitansi tenaga kerja Indonesia dari Arab Saudi mencapai US\$2.78 miliar, atau sekitar Rp. 36,9 Triliun, atau 31 persen dari total remitansi PMI yang masuk ke Indonesia, mengalahkan remitansi dari Malaysia, Taiwan atau Hongkong ([www.databoks.co.id](http://www.databoks.co.id)).

Namun sayangnya Arab Saudi menjadi negara yang paling lemah dalam menjaga keselamatan pekerja migran. Para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi harus menghadapi berbagai ancaman karena lemahnya perlindungan yang diberikan pemerintah Arab Saudi (Putri dan Nismi, 2014:10) di banding negara-negara lain. Pekerja Migran yang paling rentan menghadapi masalah adalah para perempuan yang bekerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga. Mereka seringkali mendapatkan siksaan dari sang majikan. Kasus-kasus penyiksaan ini jumlahnya sangat banyak sekali dan tidak semua informasinya sampai ke tangan pemerintah Indonesia. Penyiksaan ini bisa saja mengakibatkan kematian. Hal ini dapat terjadi di samping karena lemahnya keamanan di Arab Saudi, juga dikarenakan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Saudi adalah pekerja yang tidak memiliki pendidikan dan kemampuan memadai, kurangnya penguasaan bahasa dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan kurangnya pemahaman mereka akan budaya dan aturan hukum Arab Saudi (Putri dan Nismi, 2014:5).

Perlindungan pemerintah Saudi terhadap pekerja rumah tangga masih dirasa sangat rendah. Bagi mereka, pekerja rumah tangga bukanlah profesi, sehingga perlindungan yang diberikan kepada para pekerja migran terutama yang bekerja dalam ranah domestik ini sangat rendah. Hal ini karena belum adanya undang-undang tertulis yang mengatur perlindungan atas hak-hak mereka, karena beberapa hal: (1) Kementerian sosial yang semestinya melakukan kebijakan tidak berfungsi; (2) adanya sistem *kafala* dan *iqama*, yaitu majikan dapat menyita paspor dan visa pekerja

rumah tangga hingga kontrak selesai sebagai jaminan atas uang yang mereka bayarkan kepada penyalur tenaga kerja. Sehingga majikan dapat memperlakukan pekerja sesuka mereka, jika sang pekerja tidak kerasan sebelum kontrak berakhir, maka dia tak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Jika tidak, maka dia akan menjadi tenaga kerja ilegal yang kehilangan paspor dan visa. (3) prosedur peradilan di Arab Saudi yang menggunakan hukum *syariah* Islam tidak sesuai dengan dasar hukum Internasional. Dalam beberapa kasus, para pekerja tidak mendapatkan penerjemah, penasehat hukum, atau akses ke kantor konsulat negara asal masing-masing buruh migran Indonesia. Lambatnya akses petugas Arab Saudi dalam memberikan informasi kepada petugas diplomatik dari negara asal terkait kasus yang terjadi, serta buruknya akses putusan tertulis yang mempersulit proses dalam mengarsip dan mempersiapkan banding, karena beberapa dokumen yang diberikan menggunakan bahasa Arab sehingga sulit dimengerti. (4) tidak adanya aturan tertulis terkait jaminan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (Putri dan Nismi, 2014: 9-10).

Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya diplomatik untuk menghentikan berbagai kekerasan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia. Seperti negosiasi yang dilakukan pada tahun 2001, 2006, 2010, 2011 dan 2014. Namun pertemuan-pertemuan tersebut masih menyisakan dua *clausul* yang belum dapat disepakati bersama, yaitu kejelasan standar gaji dan sistem asuransi. Pemancung Ruyati binti Satubi pada tahun 2011 secara diam-diam kemudian menjadi klimaks emosi yang menghantarkan keputusan pemerintah Indonesia untuk mengadakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi (Fatmawati, 2016:200). Moratorium ini kemudian memberikan implikasi strategis dengan dilakukannya penandatanganan MoU perlindungan dan penempatan TKI (Fatmawati, 2016:204).

Meskipun Arab Saudi dan Indonesia menandatangani MoU pada tahun 2014 dan membatalkan moratorium 2011 tentang penghentian pengiriman tenaga kerja, nyatanya tidak menghentikan



Saudi untuk menghukum para pekerja Migran Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat adanya 103 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi pada tahun 2011-2018. Pemerintah Indonesiatelah berusaha untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi dan berhasil membebaskan 85 warga negara Indonesia ([www.mdetik.com](http://www.mdetik.com)).

### **C. Kesimpulan**

Hubungan yang erat antara Indonesia dan Arab Saudi adalah hubungan yang saling menguntungkan. Meski menguntungkan dan menghasilkan tambaha devisa bagi masing-masing negara, namun hubungan tersebut juga menghasilkan masalah yang tidak dapat dikatakan sederhana bagi masing-masing negara. Bahkan permasalahan tersebut bisa sangat serius dan mengganggu stabilitas negara masing-masing. Namun jalinan hubungan ini bersifat urgen dan tak bisa digantikan oleh negara lain. sehingga jalan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh kedua negaa adalah upaya diplomasi untuk menjalin komunikasi dan kesepahaman dalam berbagai aspek yang penting bagi keduanya. Karena masing-masing negara memberikan kontribusi besar bagi yang lain, di samping keduanya dipertemukan dalam bingkai kesamaan agama mayoritas penduduknya, yaitu Islam. Masalah yang paling sensitif dari hubungan baik ini adalah munculnya faham yang ingin memurnikan Islam dan menentang praktek-praktek Muslim Indonesia yang telah berhasil memecah belah masyarakat Indonesia. Isu ini tidak lagi hanya terbatas pada permasalahan ideologi saja, akan tetapi sudah masuk ke ranah politik dan sosial. Sehingga dari sini dibutuhkan kajian-kajian yang dilakukan secara mendalam dan terus-menerus untuk memahami akar kebudayaan Arab Saudi dan Indonesia guna menghasilkan kesepahaman dan sikap saling menghormati satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah, Nindia Noer. 2013. *Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Malang tahun 2013)*. Malang : FISIP Universitas Brawijaya.
- Aswar, Hasbi. 2016. *The Journal of Islamic Studies and International Relations (JISIIRA)*, Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia. Vol. 1 Agustus, Hal: 15-30.
- Edwinar, Della. 2015. *Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang.
- Fealey, Greg dan Bubalo, Anthony. 2005. *Jejak Kafilah : Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Terjemahan dari *Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia*.) Bandung: Mizan.
- Fatmawati, Diana. 2016. Penandatanganan MOU antara Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014. Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference Ist Program Pascasarjana UMY.
- Isdah, Fadhyatur Rizqah. 2018. *Hubungan Bilateral Arab Saudi-Indonesia di Era Pemerintahan Raja Salman-Joko Widodo*. Skripsi Universitas Hasanudin.
- Iqbal. 2013. Komunikasi Indonesia, Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia. Vol II. No.2. Hal : 77-87
- Krisna, Didi. 1993. Kamus Politik Internasional. Jakarta: Grasindo
- Masitah, Dewi. 2015. *Iqtishadia*, Dinamika Bisnis Travel Umroh Sekota Pasuruan di Era Globalisasi. Vol. 2. No.2. hal : 242- 261.
- Nuri, Muhammad. 2014. *Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji. Page. 143-154.

- Putri, Octariandry Shavita, dan Nismi, Yusnarida Eka. 2014. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau (JOM UNRI)*, Perlindungan Pemerintah Arab Saudi Terhadap Imigran (Tenaga Kerja) Indonesia 2010-2012. Vol 1. No 1. Hal 1-14.
- Rachmadi, Anugrah. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Studi tentang rekrutmen calon jemaah haji dalam keberangkatan ke Saudi Arabia di kantor kementerian Agama kota samarinda. Vo, 2 No.2. halaman 2372-2386.
- Ubaidillah. 2012. *Tsaqafiyat*, Global Salafism dan Pengaruhnya di Indonesia. Vol. 13. No. 1. Hal : 36-48.
- Ulfa, Chairiah. 2011. *Peranan kementerian luar negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi*. Skripsi USU Medan.
- [www.aceh.tribunnews.com](http://www.aceh.tribunnews.com). *Ini jumlah biaya haji 2018 per jamaah dan rincian penggunaannya*. Diakses pada 28 april 2019. Pukul 14.34.
- [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) *Kemenag dan DPR sepakat Ongkos Haji 2019 Tetap 35,2 Juta*. Diakses pada 28 April 2019. Pukul 11.08.
- [www.databoks.co.id](http://www.databoks.co.id). *Berapa Remitansi TKI dari Arab Saudi 2016?* Diakses pada 28 April 2019. Pukul 17.06.
- [www.detik.com](http://www.detik.com). *Dubes Arab Saudi 'Baru' kunjungi PBNU, Osama Al Shuaibi Diganti?*. Diakses pada 26 April 2019. Pukul 05.53.
- [www.detik.com](http://www.detik.com). *Ini alasan kemenag tak tambah kuota haji 2019*. diakses pada 27 April 2019. Pukul 08.21.
- [www.mdetik.com](http://www.mdetik.com). *Kemlu: ada 103 WNI di Saudi Terancam Hukuman Mati, 85 Dibebaskan*. Diakses pada 6 Mei 2019. Pukul 09.50.
- [www.hajiumrahnews.com](http://www.hajiumrahnews.com). *Di Saudi Tidak hanya TKI, Mahasiswa juga Banyak lho*. Diakses pada 28 April 2019. Pukul 06.17.

www.indopos.co.id. *Lima Masalah Menahun yang Belum Teratasi di Haji 2018*. Diakses pada 6 Mei 2019. Pukul 09.26.

www.kompas.com. *Kuota haji naik, kemenag upayakan penambahan anggaran dari APBN hingga efisiensi BPKH*. Diakses pada 27 April 2019. Pukul 08.21.

www.nasional.kompas.com. *Kemenag Rilis Lamanya Antrean Haji Indonesia, Sulsel Mencapai 39 Tahun*. Diakses pada 28 April 2019. Pukul 10.55.

www.republika.co.id. *Jamaah umrah 2018 1,1 juta orang, 2019 diprediksi bertambah*. Diakses pada 27 April 2019. Pukul 08.39.